

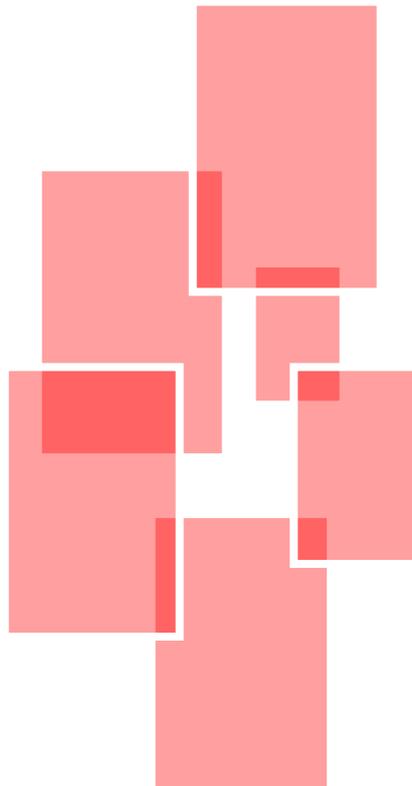
Accrual Basis

LAPORAN KEUANGAN

Periode : Januari s/d Desember 2023

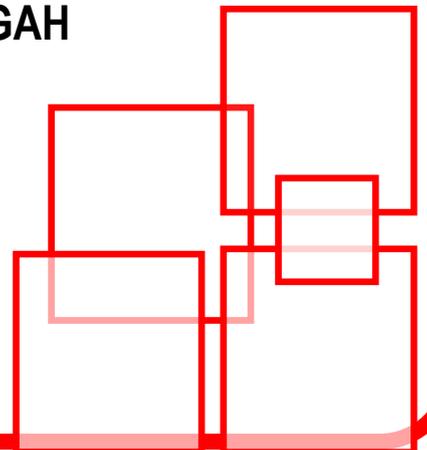


Unaudited



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

2023



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun Laporan Keuangan Berbasis Akrual yang terdiri dari : **Laporan Realisasi Anggaran; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).**

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan; dan juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan dan yang terakhir adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian Laporan Keuangan ini kami sampaikan, kritik, saran, koreksi maupun tanggapan yang sifatnya membangun dari pengguna laporan ini sangat kami harapkan demi perbaikan kedepannya agar selalu dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan yang tepat waktu, akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Palangka Raya, 15 Februari 2024

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iv
RINGKASAN	v
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	v
2. NERACA.....	v
3. LAPORAN OPERASIONAL	vi
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	vi
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD.....	4
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	10
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan	10
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	10
BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	11
4.1 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
4.1.1 Pendapatan.....	11
4.1.2 Belanja Operasional.....	11
4.1.3 Belanja Modal.....	19
4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	22
4.2.1 Pendapatan	22
4.2.2 Beban.....	22
4.2.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional.....	25
4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	25
4.3.1 Ekuitas Awal.....	25
4.3.2 Surplus (Defisit) LO.....	25
4.3.3 Koreksi Ekuitas Lainnya	25
4.3.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan.....	25
4.3.5 Ekuitas Akhir	26

4.4	Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	26
4.4.1	Aset.....	26
4.4.2	Kewajiban.....	30
4.4.3	Ekuitas	31
BAB V	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN	32
BAB VI	PENUTUP.....	33
	LAMPIRAN	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangka Raya, 15 Februari 2024

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

Ringkasan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan untuk Tahun Anggaran 2023 adalah **NIHIL**. Hal ini dikarenakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah tidak dibebankan pada target pendapatan.

Sedangkan untuk **Realisasi Belanja** sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar **Rp 15.605.555.820,00** atau mencapai **88,52%** dari total alokasi anggaran yang disediakan sebesar **Rp 17.629.701.744,00**. Sehingga terdapat sisa dana yang belum terealisasi sebesar **Rp 2.024.139.180,00** atau **11,48%**.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023		Per 31 Desember 2022	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Belanja	17.629.701.744	15.605.555.820	14.945.745.489	13.264.138.708

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada periode 31 Desember 2023 memiliki jumlah **Aset** sebesar **Rp 12.815.953.171,00** yang terdiri dari Aset Tetap sebesar Rp **12.717.838.587,00** dan Aset Lainnya sebesar **Rp 98.114.584,00**. Sedangkan nilai kewajiban sebesar **Rp 23.707.266,00**. Sementara itu jumlah ekuitas yang dimiliki adalah sebesar **Rp 12.916.522.204,00**.

Ringkasan neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	Kenaikan/ (penurunan)
Aset	12.815.953.171,00	12.357.331.083,00	458.622.088,00
• Aset Lancar	0,00	0,00	0,00
• Aset Tetap	12.717.838.587,00	12.357.133.166,00	360.705.421,00
• Aset Lainnya	98.114.584,00	197.917,00	97.916.667,00
Kewajiban Jangka Pendek	23.707.266,00	24.361.648,00	(654.382,00)

• Utang Beban	23.707.266,00	24.361.648,00	(654.382,00)
• Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00	0,00
Ekuitas	12.916.522.204,00	12.457.245.734,00	459.276.470,00

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus / defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**, sedangkan jumlah Beban adalah sebesar **Rp 15.146.279.350,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp 15.146.279.350,00)**.

Ringkasan Laporan Operasional per 31 Desember 2023 dan Tahun 31 Desember 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Uraian	Periode 31 Desember 2023	Periode 31 Desember 2022
KEGIATAN OPERASIONAL		
• Pendapatan – LO		
Pendapatan Hibah	0	0
Dana Darurat	0	0
Pendapatan Lainnya	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
• Beban		
Beban Pegawai – LO	6.440.324.981	6.499.439.433
Beban Barang dan Jasa	7.462.243.349	5.298.089.211
Beban Hibah	299.993.256	850.000.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	943.717.764	834.830.442
Beban Lain-lain	0	0
Jumlah Beban	15.146.279.350	13.482.359.086
Surplus / (Defisit) dari Operasi	(15.146.279.350)	(13.482.359.086)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		0
POS LUAR BIASA		0
Surplus / (Defisit) LO	(15.146.279.350)	(13.482.359.086)

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 (*Audited*) adalah sebesar Rp 12.332.969.435,00 ditambah dengan Defisit-LO sebesar Rp 15.146.279.350,00, RK PPKD sebesar Rp 15.605.555.820,00 sehingga didapat nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar **Rp 12.792.245.905,00**.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LANDASAN HUKUM

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

- Tahun 2013 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 69);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 85)
 11. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 47 Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022.
 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanaan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 Nomor: 188.44/535/2022 Tanggal 29 Desember 2022.

1.2. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Landasan Hukum
- 1.2. Sistematika Penulisan

BAB II PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban

5.4.3. Ekuitas

BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON
KEUANGAN

BAB VI PENUTUP

BAB II

PENCAPAIAN TARGET KINERJA SKPD

Dalam penyusunan APBD Tahun 2023 mengacu pada norma dan prinsip anggaran sebagai berikut :

1. *Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran*

Harus dapat menyajikan informasi yang jelas secara terbuka dan mudah di akses oleh masyarakat meliputi tujuan, sasaran, sumber pendanaan setiap jenis/objek belanja serta koreksi antara besaran anggaran dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan yang dianggarkan, oleh karena itu setiap pengguna anggaran harus bertanggung jawab terhadap pengguna sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang ditetapkan.

2. *Disiplin Anggaran*

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan pada tiap program/kegiatan merupakan batas tertinggi.
- b. Pengeluaran harus didukung dengan kepastian penerimaan yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya dalam APBD.
- c. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang berkenaan harus dianggarkan dalam APBD.

3. *Keadilan Anggaran*

Pajak, retribusi dan pungutan daerah lainnya yang dibebankan kepada masyarakat harus dipertimbangkan kemampuan daya bayar. Masyarakat yang memiliki pendapatan rendah secara proporsional diberikan beban yang sama, sedangkan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban yang tinggi pula. Untuk menyeimbangkan dimaksud pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional guna menghilangkan rasa ketidakadilan

4. *Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran*

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

5. *Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, dimana pada Bab XXVIII, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai **Tugas** yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah, menyelenggarakan **Fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Fasilitasi, advokasi dan sosialisasi kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana;
- d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengarusutamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- f. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi perlindungan dan tumbuh kembang anak;
- g. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pengendalian penduduk;
- h. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- i. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- j. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan fasilitasi, advokasi dan sosialisasi penyusunan informasi data;

- k. Pengelolaan kesekretariatan Badan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan tanggungjawab.

Pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan 10 (sepuluh) program, 25 (dua puluh lima) kegiatan yang terdiri dari 51 (lima puluh satu) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar **Rp 17.629.701.744,00** sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

Anggaran setelah perubahan

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2	BELANJA LANGSUNG	17.629.701.744	15.605.555.820	2.024.145.924
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16.120.206.699	14.134.917.512	1.985.289.187
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12.272.169.181	10.800.738.776	1.471.430.405
2.08.01.1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	437.670.647	433.974.706	3.695.941
2.08.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	45.453.877	45.285.500	168.377
2.08.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	31.046.968	31.022.400	24.568
2.08.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.516.476	31.511.200	5.276
2.08.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	329.653.326	326.155.606	3.497.720
2.08.01.1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	7.065.039.516	6.206.086.977	858.952.539
2.08.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.979.384.912	6.120.436.477	858.948.435
2.08.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.577.302	13.577.100	202
2.08.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72.077.302	72.073.400	3.902
2.08.01.1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	31.231.906	31.231.700	206
2.08.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	31.231.906	31.231.700	206
2.08.01.1.05	<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	70.873.906	67.465.692	3.408.214
2.08.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	70.873.906	67.465.692	3.408.214
2.08.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	1.379.913.467	1.094.125.150	285.788.317
2.08.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.937.132	23.935.200	1.932
2.08.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72.033.129	72.026.500	6.629
2.08.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	51.388.771	51.388.750	21
2.08.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	26.120.100	26.025.000	95.100
2.08.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	60.133.129	60.098.000	35.129
2.08.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	920.942.077	735.292.700	185.649.377
2.08.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	225.359.129	125.359.000	100.000.129
2.08.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	1.420.447.794	1.356.306.102	64.141.692
2.08.01.1.07.07	Pengadaan Aset Tetap lainnya	1.048.243.841	984.491.250	63.752.591
2.08.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	372.203.953	371.814.852	389.101
2.08.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.701.341.092	1.446.020.977	255.320.115
2.08.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.077.302	12.077.250	52

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2.08.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	319.577.648	286.197.227	33.380.421
2.08.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.369.686.142	1.147.746.500	221.939.642
2.08.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	165.650.853	165.527.472	123.381
2.08.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	108.004.900	107.922.472	82.428
2.08.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.645.953	57.605.000	40.953
2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.074.393.501	707.140.568	367.252.933
2.08.02.1.01	<i>Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi</i>	199.043.476	186.373.414	12.670.062
2.08.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	74.278.437	3.262.214	11.016.223
2.08.02.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi	71.986.600	71.986.600	0
2.08.02.1.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi	52.778.439	51.124.600	1.653.839
2.08.02.1.02	<i>Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi</i>	838.324.225	483.734.607	354.589.618
2.08.02.1.02.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	730.609.237	380.246.692	350.362.545
2.08.02.1.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi	107.714.988	103.487.918	4.227.070
2.08.02.1.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>	37.025.800	37.025.800	0
2.08.02.1.03.03	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi	37.025.800	37.025.800	0
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.029.521.131	920.917.688	108.603.443
2.08.03.1.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	600.159.204	571.336.799	28.822.405
2.08.03.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi	50.362.102	47.716.900	2.645.202
2.08.03.1.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	549.797.102	523.619.899	26.177.203
2.08.03.1.02	<i>Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	230.059.781	228.328.039	1.731.742
2.08.03.1.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	137.098.679	135.572.363	1.526.316
2.08.03.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	92.961.102	92.755.676	205.426
2.08.03.1.03	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi</i>	199.302.146	121.252.850	78.049.296
2.08.03.1.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	102.317.146	102.307.850	9.296
2.08.03.1.03.03	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi darurat dan kondisi khusus kewenangan provinsi	96.985.000	18.945.000	78.040.000
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	158.521.078	157.820.950	700.128
2.08.04.1.01	<i>Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi</i>	73.796.600	73.796.600	0

Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
2.08.04.1.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	73.796.600	73.796.600	0
2.08.04.1.03	<i>Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	84.724.478	84.024.350	700.128
2.08.04.1.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	84.724.478	84.024.350	700.128
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	217.530.460	217.267.310	263.150
2.08.05.1.01	<i>Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi</i>	217.530.460	217.267.310	263.150
2.08.05.1.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi	66.673.010	66.471.968	201.042
2.08.05.1.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi	150.857.450	150.795.342	62.108
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	778.448.913	754.656.114	23.792.799
2.08.06.1.01	<i>Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi</i>	424.245.606	416.412.904	7.832.702
2.08.06.1.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga	349.835.900	342.119.354	7.716.546
2.08.06.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	74.409.706	74.293.550	116.156
2.08.06.1.02	<i>Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi</i>	354.203.307	338.243.210	15.960.097
2.08.06.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	104.203.307	102.569.070	1.634.237
2.08.06.1.02.04	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi dan lintas kabupaten/kota	250.000.000	235.674.140	14.325.860
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	589.622.435	576.382.850	13.239.585
2.08.07.1.01	<i>Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</i>	96.126.741	94.206.500	1.920.241
2.08.07.1.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi	96.126.741	94.206.500	1.920.241
2.08.07.1.02	<i>Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi</i>	493.495.694	482.176.350	11.319.344
2.08.07.1.02.01	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	121.578.742	121.570.450	8.292
2.08.07.1.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	371.916.952	360.605.900	11.311.052
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.509.495.045	1.473.069.804	36.425.241
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0	0	0
2.14.021.01	<i>Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</i>	0	0	0
2.14.021.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	0	0	0
2.14.021.01.03	Advokasi dan Sosialisasi Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)	0	0	0
2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	36.339.945	36.219.400	120.545
2.14.03.1.01	<i>Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal</i>	0	0	0

Kode Rekening	Program Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)
02.14.03.1.01.02	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan	0	0	0
2.14.03.1.02	<i>Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan kesertaan ber-KB</i>	36.339.945	36.219.400	120.545
2.14.03.1.02.03	Pengembangan dan Penguatan Jejaring kemitraan dalam program KKBPK	36.339.945	36.219.400	120.545
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.473.155.100	1.436.850.404	36.304.696
2.14.04.1.01	<i>Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</i>	1.473.155.100	1.436.850.404	36.304.696
2.14.04.1.01.14	Prlaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000HPK	1.473.155.100	1.436.850.404	36.696.304

Sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan dan kinerja, dengan ini kami lampirkan pencapaian target kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Kalimantan Tengah.

Pendapatan

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>Pendapatan Asli Daerah</i>	0	0	0
<i>Pendapatan Transfer</i>	0	0	0
<i>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</i>	0	0	0
Total	0	0	0

Belanja

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
<i>Belanja Langsung</i>	17.629.701.744,00	15.605.555.820,00	88,52
Total	17.629.701.744,00	15.605.555.820,00	88,52

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan.

B. Belanja

Sampai dengan periode 31 Desember 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah dapat merealisasikan Belanja Daerah sebesar **Rp 15.605.555.820,00** atau **88,52 %** dari total Pagu Anggaran yang disediakan **Rp 17.629.701.744,00** dengan rincian realisasi belanja sebagai berikut :

▪ Belanja Pegawai	Rp	6.440.324.981
▪ Belanja Barang dan Jasa	Rp	7.489.242.899
▪ Belanja Hibah	Rp	299.993.256
▪ Belanja Bantuan Sosial	Rp	0
▪ Belanja Modal	Rp	1.375.994.684

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

- Adanya Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum (Tenaga Kontrak) yang sebelumnya dianggarkan untuk 23 orang hanya terserap untuk 17 orang .
- Adanya Dana Hibah yang tidak bisa direalisasikan yaitu BKOW.
- Adanya Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri yang tidak bisa direalisasikan.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

4.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

4.1.1. PENDAPATAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) : NIHIL

4.1.2. BELANJA OPERASI

Belanja Operasi terdiri atas :

A. BELANJA PEGAWAI

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar **Rp7.307.704.912,00** atau **41,45%** dari Total Anggaran SKPD sebesar **Rp. 17.629.701.744,00**. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 6.442.756.477,00** atau **88,16 %** sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 864.948.435,00 (11,84%)**.

Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Desember 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Gaji dan Tunjangan PNS	4.261.084.912	3.577.599.981	83,96	3.567.284.433
- Gaji Pokok PNS	3.020.307.586	2.639.070.995	87,38	2.661.086.471
- Tunjangan Keluarga	301.112.000	208.464.980	69,23	185.416.059
- Tunjangan Jabatan	331.915.500	273.600.000	82,43	265.395.000
- Tunjangan Fungsional	107.912.000	62.640.000	58,05	23.925.000
- Tunjangan Fungsional Umum	26.960.000	26.640.000	98,81	61.370.000
- Tunjangan Beras	153.614.900	131.804.400	85,80	131.659.560
- Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	37.170.540	23.366.300	62,86	20.948.487
- Pembulatan Gaji	172.640	31.433	18,21	32.714
- Iuran Jaminan Kesehatan	221.571.547	190.320.589	85,90	195.453.273
- Iuran Jaminan Kecelakaan	8.162.939	5.415.322	66,34	5.499.425
- Iuran Jaminan Kematian	24.488.817	16.245.962	66,34	16.498.444
- Iuran Simpanan Peserta Taperum	27.696.443	0	0,00	0
Tambahan Penghasilan PNS	2.718.300.000	2.540.405.000	93,46	2.644.755.000
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	2.718.300.000	2.540.405.000	93,46	2.644.755.000
Honorarium PNS	328.320.000	322.320.000	98,17	287.400.000
- Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	8.160.000	8.160.000	100	8.160.000
- Honorarium Pengelola Keuangan	320.160.000	314.160.000	98,13	279.240.000
Belanja Pegawai	7.307.704.912	6.440.324.981	88,13	6.499.439.433

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar **Rp 8.132.002.197,00** atau **46,13%** dari Total Anggaran SKPD. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 7.489.242.899,00** atau **92,10%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 642.759.298,00 (7,90%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 5.295.573.775,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bahan Pakai Habis	1.582.817.681	1.491.032.865	94,20	1.142.422.250
- Belanja Jasa	2.591.061.354	2.252.232.395	86,92	1.583.120.411
- Belanja Pemeliharaan	167.645.953	167.602.307	99,97	77.548.513
- Belanja Perjalanan Dinas	3.769.927.209	3.557.825.332	94,37	2.405.332.601
- Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, masy.	20.550.000	20.550.000	100	87.150.000
Jumlah	8.132.002.197	7.489.242.899	92,10	5.295.573.775

1. Belanja Barang Pakai Habis (5.1.02.01.01)

Belanja Barang Pakai Habis Kantor dianggarkan sebesar **Rp 1.582.817.681,00** atau **19,46%** dari Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 1.491.032.865,00** atau **94,20%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 91.784.816,00 (5,80%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.142.422.250,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.680.000	1.680.000	100	0
- Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	48.948.100	48.868.765	99,84	44.554.000
- Belanja bahan-Bahan Baku	0	0	0	3.655.500
- Belanja Bahan Habis Pakai Lainnya	64.114.400	25.121.400	39,18	44.725.000
- Belanja alat tulis kantor	154.575.380	152.796.300	98,85	139.178.550
- Belanja Kertas dan Cover	64.820.961	63.838.700	98,48	61.904.500
- Belanja Bahan Cetak	550.217.440	544.448.200	98,95	336.041.700
- Belanja benda pos lainnya	11.930.000	11.930.000	100	11.720.000
- Belanja Bahan Komputer	10.894.700	10.844.700	99,54	300.000
- Belanja Perabot Kantor	22.909.700	22.888.800	99,91	32.073.000
- Belanja alat listrik	26.273.000	26.197.000	99,71	26.400.000

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	156.860.000	152.460.000	97,19	0
- Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kaporlap dan Perlengkapan satwa (baju satpam)	9.900.000	9.900.000	100	0
- Belanja Alat Bahan untuk Kegiatan Kantor lainnya	72.060.000	36.057.000	50,04	54.900.000
- Belanja Obat - Obatan	0	0	0	4.014.000
- Belanja Obat-Obatan Lainnya	0	0	0	350.000
- Belanja Natura dan Pakan-Natura	16.589.000	16.572.000	99,90	0
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat	309.760.000	306.145.000	98,83	299.862.500
- Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	54.805.000	54.805.000	100	82.743.500
- Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	6.480.000	6.480.000	100	0
Jumlah	8.132.002.197	7.489.242.899	92,10	1.142.422.250

2. Belanja Jasa (5.1.02.02)

a. Belanja Jasa Kantor (5.1.02.02.01)

Belanja Jasa Kantor dianggarkan sebesar **Rp 2.013.657.648,00** atau **24,76%** dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 1.698.324.153,00** atau **84,34%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 315.333.495,00 (15,66%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.132.887.411,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	525.250.000	457.600.000	87,12	257.850.000
- Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat	5.200.000	5.200.000	100	57.850.000
- Belanja Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	57.600.000	57.600.000	100	-
- Honorarium Rohaniwan	6.000.000	3.200.000	53,33	0

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	52.800.000	52.800.000	100	50.400.000
- Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	15.000.000	15.000.000	100	0
- Belanja Jasa Tenaga Administrasi	750.060.000	549.848.826	73,31	0
- Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0	0	0	247.550.000
- Belanja Jasa Tenaga Ahli	34.000.000	29.000.000	85,29	101.100.000
- Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	0	0	0	12.000.000
- Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	0	0	0	2.210.000
- Belanja Jasa Konversi Aplikasi/ Sistem Informasi	0	0	0	45.150.000
- Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	65.250.000	65.000.000	99,62	0
- Belanja Jasa Pengolahan Sampah	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000
- Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	145.225.000	139.800.000	96,26	94.250.000
- Belanja telepon	1.875.000	1.391.800	74,23	1.333.128
- Belanja Air	2.089.510	1.155.630	55,31	1.170.680
- Belanja listrik	231.935.798	206.413.517	89,00	166.674.542
- Belanja surat kabar/majalah	25.620.000	25.525.000	99,63	22.500.000
- Belanja Kawat/Faksimili/ Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit	85.552.340	78.628.080	91,91	64.304.061
- Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	9.000.000	8.961.300	99,57	7.345.000
Jumlah	2.013.657.648	1.698.324.153	84,34	1.132.887.411

b. Belanja Iuran/Jaminan Asuransi (5.1.02.02.02)

Belanja Premi Asuransi dianggarkan sebesar **Rp 33.522.912,00** atau **0,41%** dari total anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 22.240.074,00** atau **66,34%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 11.282.838,00 (33,66%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 9.368.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30.002.400	21.984.000	73,27	9.368.000
- Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.568.592	113.484	7,23	0
- Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.951.920	142.590	7,31	0
Jumlah	33.522.912	22.240.074	66,34	9.368.000

c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin (5.1.02.02.04)

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar **Rp 24.053.026,00** atau **0,30%** dari total anggaran belanja barang dan jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 23.900.000,00** atau **99,36%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 153.026,00** atau **0,64%**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 104.780.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja sewa kendaraan bermotor penumpang	15.353.026	15.200.000	99,00	20.000.000
- Belanja sewa alat kantor lainnya	0	0	0	5.225.000
- Belanja Sewa alat rumah tangga lainnya (home-use)	8.700.000	8.700.000	100	79.055.000
- Belanja sewa peralatan studio audio	0	0	0	500.000
Jumlah	24.053.026	23.900.000	99,36	104.780.000

d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan (5.1.02.02.05)

Belanja Sewa Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar **Rp 463.841.000,00** atau **5,70%** dari Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 456.923.000,00** atau **98,51%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 6.918.000,00** (**1,49%**). Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 306.386.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja sewa gedung tempat pertemuan	459.341.000	456.923.000	99,47	263.336.000
- Belanja sewa gedung tempat kerja lainnya	4.500.000	0	0,00	7.500.000
- Belanja Sewa Taman	0	0	0,00	2.500.000
- Belanja Sewa hotel	0	0	0,00	22.400.000
- Belanja sewa gedung tempat tinggal lainnya	0	0	0,00	10.650.000
Jumlah	463.841.000	456.923.000	98,51	306.386.000

e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya (5.1.02.02.07)

Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar **Rp 6.000.000,00** atau **0,07%** dari total anggaran belanja barang dan jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 6.000.000,00** atau **100%**. Sedangkan pada tahun 2022 **Tidak Dianggarkan**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	6.000.000	6.000.000	100	0
Jumlah	6.000.000	6.000.000	100	0

f. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi (5.1.02.02.08)

Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dianggarkan sebesar **Rp 26.486.768,00** atau **0,33%** dari total anggaran belanja barang dan jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 26.345.168,00** atau **99,47%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 141.600,00** atau **0,53%**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 29.699.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0	0	0	24.729.000
- Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur lainnya	11.047.100	11.018.000	99,74	0
- Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	15.439.668	15.327.168	99,27	4.970.000
Jumlah	26.486.768	26.345.168	99,47	29.699.000

g. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan (5.1.02.02.12)

Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan serta Pendidikan dan Pelatihan dianggarkan sebesar **Rp 23.500.000,00** atau **0,12%** dari total anggaran belanja barang dan jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 18.500.000,00** atau **78,72%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 5.000.000,00** atau **21,28%**. Sedangkan Realisasi pada Tahun 2022 sebesar **Rp 0,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Bimbingan Teknis	23.500.000	18.500.000	78,72	0
Jumlah	23.500.000	18.500.000	78,72	0

3. Belanja Pemeliharaan (5.1.02.03)

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar **Rp 167.645.953,00** atau **2,06%** dari Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 167.602.307,00** atau **99,97%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 43.646,00** atau **0,03%**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 77.548.513,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.645.953	117.602.307	99,96	77.548.513
- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	100	0
Jumlah	167.645.953	167.602.307	99,97	77.548.513

4. *Belanja Perjalanan Dinas (5.1.02.04)*

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar **Rp 3.769.927.209,00** atau **46,36%** dari Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 3.557.825.332,00** atau **94,37%**, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar **Rp 212.101.877,00 (5,63%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp **2.405.332.601,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.200.609.989	3.182.420.332	99,43	2.201.827.601
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	193.470.000	185.665.000	95,97	203.505.000
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	183.500.000	182.540.000	99,48	0
- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	42.346.024	7.200.000	17,00	0
- Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	150.001.196	0	0,00	0
Jumlah	3.769.927.209	3.557.825.332	94,37	2.405.332.601

5. *Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, Masyarakat (5.1.02.05)*

Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, Masyarakat dianggarkan sebesar **Rp 20.550.000,00** atau **0,25%** dari Total Anggaran Belanja Barang dan Jasa. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 20.550.000,00 (100%)**, Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 adalah **Rp 87.150.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	20.550.000	20.550.000	100	37.500.000
- Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0	0	0	49.650.000
Jumlah	20.550.000	20.550.000	100	87.150.000

C. BELANJA HIBAH

Belanja Hibah dianggarkan sebesar **Rp 650.000.000,00** atau **3,69%** dari Total Anggaran SKPD. Sampai dengan 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 299.993.256,00 (46,15%)**. Sedangkan realisasi per 31 Desember 2022 adalah **Rp 850.000.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Per 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	650.000.000	299.993.256	46,15	850.000.000

4.1.3. BELANJA MODAL

Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mengalokasikan anggaran untuk Belanja Modal sebesar **Rp 1.539.994.635,00** atau sebesar **8,74%** dari total anggaran SKPD. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 telah terealisasi sebesar **Rp 1.375.994.684** atau **89,35%**. Sedangkan belanja modal per 31 Desember 2022 telah terealisasi sebesar **Rp 619.125.500,00**.

Uraian	Anggaran	Realisasi per 31 Desember 2023	%	Realisasi Per 31 Desember 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.044.277.450	980.525.000	93,90	422.961.500
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.717.185	295.469.684	99,92	196.164.000
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	200.000.000	100.000.000	50,00	0
Jumlah	1.539.994.635	1.375.994.684	89,35	619.125.500

1. *Belanja Modal Peralatan dan Mesin*

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp 1.044.277.450,00** atau **67,81%** dari Total Anggaran Belanja Modal. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 Belanja Modal Peralatan dan Mesin telah terealisasi sebesar **Rp 980.525.000,00** atau **93,90%**. Sedangkan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebesar **Rp 422.961.500,00**. Perbandingan rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Periode 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Belanja Modal Alat Angkutan				
- Pengadaan Alat Kendaraan Bermotor Penumpang	700.000.000	641.800.000	91,69	0
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
- Pengadaan Mesin Tik	0	0	0,00	1.250.000
- Pengadaan Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0	0,00	4.551.000
- Pengadaan Alat Kantor Lainnya	0	0	0,00	37.253.900
- Pengadaan Mebel	115.975.000	113.725.000	98,06	0
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
- Pengadaan Peralatan Studio Audio	0	0	0,00	199.200.000
- Pengadaan Alat Komunikasi lainnya	0	0	0,00	9.501.600
Belanja Modal Alat Laboratorium				
- Pengadaan Alat Peraga Kejuruan	49.842.450	49.350.000	99,01	0
- Pengadaan Alat Peraga PAUD/TK	0	0	0,00	14.985.000
Pengadaan Komputer				
- Pengadaan Personal Komputer	0	0	0,00	135.085.000
- Pengadaan Jomputer Unit Lainnya	136.000.000	135.000.000	99,26	0
- Pengadaan Peralatan Personal Komputer	36.960.000	35.250.000	95,37	11.145.000

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Periode 31 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
- Pengadaan Peralatan Komputer lainnya	5.500.000	5.400.000	98,18	9.990.000
TOTAL	1.044.277.450	980.525.000	93,90	422.961.500

2. *Belanja Modal Gedung dan Bangunan*

Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp 295.717.185,00** atau **19,20%** dari Anggaran Belanja Modal. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 Belanja Modal Gedung dan Bangunan telah terealisasi sebesar **Rp 295.469.684,00** atau **99,92%**. Sedangkan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah sebesar **Rp 196.164.000,00**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Periode 30 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
- Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0	0	0	196.164.000
- Pengadaan Taman Kantor	7.136.185	7.136.184	100	0
- Pengadaan Pagar Kantor	288.581.000	288.333.500	99,91	0
TOTAL	295.717.185	295.469.684	99,92	196.164.000

3. *Belanja Modal Aset Tetap Lainnya*

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada tahun 2023 dianggarkan sebesar **Rp 200.000.000,00** atau **12,99%** dari Anggaran Belanja Modal. Sampai dengan periode 31 Desember 2023 Belanja Modal Aset Tetap lainnya telah terealisasi sebesar **Rp 100.000.000,00** atau **50,00%**. Sedangkan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Tidak Dianggarkan**.

Uraian	Per 31 Desember 2023			Realisasi Periode 30 Des 2022
	Anggaran	Realisasi	%	
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja				
- Pengadaan Aset Tidak Bertwujud Lainnya	200.000.000	100.000.000	50,00	0
TOTAL	200.000.000	100.000.000	50,00	196.164.000

4.2. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.2.1. PENDAPATAN

Jumlah pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**. Sedangkan Tahun 2022 juga **NIHIL**.

4.2.2. BEBAN

Jumlah Beban Operasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 15.146.279.350,00**. Sedangkan pada Tahun 2022 adalah sebesar **Rp 13.482.359.086,00**.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023			Beban Per 31 Desember 2022
		Belanja	Beban	Selisih	
1	Beban Pegawai	6.440.324.981	6.440.324.981	0	6.499.439.433
2	Beban Barang dan Jasa	7.489.242.899	7.462.243.349	26.999.550	5.298.089.211
3	Beban Hibah	299.993.256	299.993.256	0	850.000.000
4	Beban Penyusutan dan Amortisasi	943.717.764	943.717.764	0	834.830.442
	Jumlah	15.605.555.820	15.146.279.350	26.999.550	13.482.359.086

Selisih sebesar **Rp 26.999.550,00** adalah utang beban yang terdiri dari Jasa Konsultasi Kontruksi Rp 26.345.168,00 dan selisih utang beban Telepon, Air dan Listrik sebesar Rp 654.382,00.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023		
		Belanja	Beban	Selisih
1	Telepon	1.391.800	1.446.300	(54.500)
2	Air	1.155.630	1.174.440	(18.810)
3	Listrik	206.413.517	205.685.825	727.692
4	Jasa Konsultasi Konstruksi	26.345.168	0	26.345.168
	Jumlah	235.306.115	208.306.565	26.999.550

a. *Beban Pegawai*

Beban pegawai merupakan beban yang dikeluarkan untuk pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan dan tambahan penghasilan bagi pegawai pemerintah yang berstatus ASN.

Jumlah beban pegawai s/d periode 31 Desember 2023 **Rp 6.440.324.981,00**. Sedangkan untuk tahun 2022 sebesar **Rp 6.499.439.433,00**.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023			Beban Per 31 Desember 2022
		Belanja	Beban	Selisih	
1	Gaji dan Tunjangan	3.577.599.981	3.577.599.981	0	3.567.284.433
2	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja	2.540.405.000	2.540.405.000	0	2.644.755.000
3	Tambahan Penghasilan Uang Makan	0	0	0	0
4	Honorarium	322.320.000	322.320.000	0	287.400.000
	Jumlah	6.440.324.981	6.440.324.981	0	6.499.439.433

b. Beban Barang dan Jasa

Beban barang dan jasa merupakan konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Jumlah beban barang dan jasa periode 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 7.462.243.349,00**, sedangkan untuk tahun 2022 (per 31 Desember 2022) adalah sebesar **Rp 5.298.089.211,00**.

Rincian beban barang dan jasa s.d periode 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) adalah sebagai berikut :

Uraian	Per 31 Desember 2023			31 Des 2022
	Belanja	Beban	Selisih	
- Beban Barang Pakai Habis	1.491.032.865	1.491.032.865	0	1.157.407.250
- Beban Jasa Kantor	1.698.324.153	1.697.669.771	654.382	1.150.116.847
- Beban Premi Asuransi	22.240.074	22.240.074	0	9.368.000
- Beban Sewa Peralatan Mesin	23.900.000	23.900.000	0	104.780.000
- Beban Sewa Gedung dan Bangunan	456.923.000	456.923.000	0	306.386.000
- Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	6.000.000	6.000.000	0	0
- Beban Jasa Konsultasi Konstruksi	26.345.168	0	26.345.168	0
- Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek serta Pendidikan dan Pelatihan	18.500.000	18.500.000	0	0
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117.602.307	117.602.307	0	77.548.513
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50.000.000	50.000.000	0	0
- Beban Perjalanan Dinas	3.557.825.332	3.557.825.332	0	2.405.332.601
- Beban Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, masy	20.550.000	20.550.000	0	37.500.000
- Beban Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain, masy	0	0	0	49.650.000
Jumlah	7.489.242.899	7.462.243.349	26.999.550	5.298.089.211

c. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah kota lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Sampai dengan 31 Desember 2023 beban Hibah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar **Rp 299.993.256,00**, sedangkan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) beban Hibah adalah senilai **Rp 850.000.000,00**.

No	Uraian	Per 31 Desember 2023			Beban Per 31 Desember 2022
		Belanja	Beban	Selisih	
1	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	299.993.256	299.993.256	0	850.000.000
	Jumlah	299.993.256	299.993.256	0	850.000.000

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap adalah pengurangan nilai pengakuan atas penggunaan manfaat potensial dari suatu nilai aset yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada periode berjalan.

Sampai dengan 31 Desember 2023 beban penyusutan aset tetap yang dimiliki entitas adalah **Rp 943.717.764,00**, sedangkan pada tahun 2022 (per 31 Desember 2022) beban penyusutan adalah senilai **Rp 834.830.442,00**.

No	Kode Jenis Barang	Jenis Barang	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	1.3.2.2	Alat Angkutan	156.915.403,00	109.753.999,00
2	1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	381.896.513,00	184.320.199,00
3	1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	95.943.613,00	92.454.360,00
4	1.3.2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	650.000,00	650.000,00
5		Alat Laboratorium	3.714.062,00	0,00
6	1.3.2.10	Komputer	123.279.808,00	88.658.019,00
7	1.3.3.1	Bangunan Gedung	177.210.032,00	174.545.140,00
8	1.3.4.4	Instalasi	2.025.000,00	2.025.000,00
9		Aset Lain-Lain	2.083.333,00	0,00
		Jumlah Beban Penyusutan	943.717.764,00	834.830.442,00

e. Beban Lain-lain

Beban lain-lain pada tahun 2023 dan 2022 adalah **NIHIL**.

4.2.3. SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL NIHIL.

4.3. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

4.3.1. EKUITAS AWAL

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan Tahun 2022 (*Audited*) adalah masing-masing sebesar **Rp 12.332.969.435,00** dan **Rp 12.675.466.112,00**.

4.3.2. SURPLUS (Defisit) LO

Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 15.146.279.350,00** Sedangkan per 31 Desember 2022 Defisit-LO sebesar **Rp 13.606.635.385,00**.

4.3.3. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya s/d periode 31 Desember 2023 dan pada Tahun 2022 (periode 31 Desember 2022) adalah Rp 0,00.

4.3.4. EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

Ekuitas untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Nilai Ekuitas untuk dikonsolidasikan s/d periode 31 Desember 2023 adalah **Rp 15.605.555.820,00**. Sedangkan pada Tahun 2022 (s/d

periode 31 Desember 2022) kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar **Rp 13.264.138.708,00**.

4.3.5. NILAI EKUITAS AKHIR

Nilai Ekuitas Akhir sampai dengan periode 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 (per 31 Desember 2022) adalah masing-masing sebesar **Rp 12.792.245.905,00** dan **Rp 12.332.969.435,00**.

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

4.4.1. ASET

Aset terdiri atas :

A. Aset Lancar

1. Kas Bendahara Penerimaan

Saldo kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

2. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

3. Piutang

Nilai Piutang sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

4. Beban Dibayar Dimuka

Nilai beban dibayar dimuka sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

5. Persediaan

Saldo Persediaan Barang Pakai Habis sebagaimana BA Persediaan Stock Opname Barang Pakai Habis sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **Rp 0,00** Sedangkan Persediaan tahun 2022 / Saldo Awal Persediaan per 1 Januari 2022 adalah **Rp 0,00**.

B. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap Per 01 Januari 2023 (*Saldo Awal*) adalah sebesar **Rp 15.156.327.070,00** Sampai dengan 31 Desember 2023 terjadi mutasi tambah sebesar **Rp 1.597.809.536,00** dan mutasi kurang sebesar **Rp 295.469.684,00** Selain itu pula terdapat penambahan penyusutan nilai aset tetap sebesar **Rp 943.717.764,00**, sehingga

diperoleh nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 3.740.828.335,00**. Akibat adanya mutasi tambah dan kurang tersebut, maka diperoleh nilai akhir Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 16.458.666.922,00**.

Perbandingan Rincian Aset Tetap, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Aset	Saldo Awal 01 Jan 2023	Mutasi			Saldo per 31 Desember 2023
		Koreksi	Tambah	Kurang	
Tanah	1.404.000.000	-	-	-	1.404.000.000
Peralatan dan Mesin	4.810.825.513	-	980.525.000	-	5.791.350.513
Gedung dan Bangunan	8.860.501.557	-	295.469.684	295.469.684	8.860.501.557
Jalan, irigasi, Jaringan	81.000.000	-	-	-	81.000.000
Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	321.814.852	-	321.814.852
Jumlah	15.156.327.070		1.597.809.536	295.469.684	16.458.666.922
Akumulasi Penyusutan	3.740.828.335	-	-	-	3.740.828.335
Total Nilai Aset Tetap					12.717.838.587

1. Tanah

Nilai Aset berupa Tanah yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023 adalah **Rp 1.404.000.000,00**.

Mutasi Perubahan Tanah : **NIHIL**

Uraian	Jumlah	
Saldo Awal per 01 Januari 2023 (a)	Rp	1.404.000.000
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	0
▪ Transfer masuk	Rp	0
▪ Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52)	Rp	0
▪ Pengembangan	Rp	0
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	0
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	0
Jumlah (b)	Rp	0
Pengurangan		
▪ Transfer keluar	Rp	0
▪ Pengalihan (keluar)	Rp	0
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	0
▪ Koreksi Nilai	Rp	0
Jumlah (c)	Rp	0
Kenaikan/penurunan (b-c)	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp	1.404.000.000

2. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan - Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Teknis Provinsi Kalimantan Tengah Per 31 Desember 2023 adalah nilai Barang Milik Daerah gabungan (*intrakomptabel* dan

ekstrakomptabel) dengan nilai sebesar **Rp 5.791.350.513,00**
 Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal dengan nilai sebesar **Rp 4.810.825.513,00**.

Uraian	Rp	Jumlah
Saldo Awal per 01 Januari 2023 (a)	Rp	4.810.825.513
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	980.525.000
▪ Transfer masuk	Rp	0
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	0
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	0
Jumlah (b)	Rp	0
Pengurangan :		
▪ Transfer keluar	Rp	0
▪ Pengalihan (keluar)	Rp	0
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	0
▪ Koreksi Nilai	Rp	0
▪ Penghapusan	Rp	0
Jumlah (c)	Rp	0
Kenaikan /penurunan (b-c)	Rp	0
Saldo per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp	5.791.350.513

3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah **Rp 8.860.501.557,00**

Uraian	Rp	Jumlah
Saldo Awal per 01 Januari 2023(a)	Rp	8.634.638.557
Penambahan:		
▪ Pembelian	Rp	
▪ Koreksi Nilai (kapitalisasi nilai perolehan (MAK 52)	Rp	
▪ Pengembangan	Rp	
▪ Reklasifikasi masuk	Rp	295.469.684
▪ Pengalihan (masuk)	Rp	
Jumlah (b)	Rp	8.860.501.557
Pengurangan :		
▪ Reklasifikasi keluar	Rp	295.469.684
▪ Koreksi Nilai	Rp	
▪ Penghapusan	Rp	
Jumlah (c)	Rp	0
Kenaikan /penurunan (b-c)	Rp	8.860.501.557
Saldo per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp	8.860.501.557

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Jalan irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah **Rp 81.000.000,00**.

5. Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Tetap berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah **Rp 321.814.852,00**.

7. Akumulasi Penyusutan

Nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar **Rp 3.740.828.335,00**.

C. Aset Lainnya

1. Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah sebanyak 12 buah berupa barang Rusak Berat dengan nilai sebesar **Rp. 42.781.150,00** Berikut Uraianya :

No	Uraian/Jenis Barang/Rincian Barang	Vol	Satuan	Biaya Fisik	Biaya Perolehan	Harga Perolehan	Tahun Perolehan	Ket
1	Papan Pengumuman (Struktur Organisasi)	1	Buah	7.852.800	0	7.852.800	2015	
2	Meja Kayu/Rotan	1	Buah	400.500	0	400.500	2011	
3	Kipas Angin	2	Buah	1.600.000	0	1.600.000	2014	
4	Televisi	1	Buah	4.400.000	0	4.400.000	2015	
5	Printer	2	Buah	2.440.000	0	2.440.000	2014	
6	Printer A3	1	Buah	5.600.000	0	5.600.000	2015	
7	Laptop	1	Buah	9.500.000	0	9.500.000	2016	
8	Notebook	1	Buah	8.465.000	0	8.465.000	2014	
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Buah	1.350.000	0	1.350.000	2009	
10	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1	Buah	1.172.000	0	1.172.000	2015	
Total						42.781.150		

2. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Nilai akumulasi penyusutan Aset Lainnya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar **Rp 42.583.233,00**.

D. Ekstracomptable

Aset Ekstracomptable yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi yang diakui sebagai Aset Tetap yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 adalah **Rp 202.800,00**

Mutasi perubahan Aset Lainnya :

Uraian	Jumlah
Saldo Awal per 01 Januari 2023 (a)	Rp 202.800,00
Penambahan:	
- Pembelian	Rp
- Reklasifikasi masuk	Rp
- Pengalihan (masuk)	Rp
Jumlah (b)	Rp
Pengurangan	
- Transfer keluar	Rp
- Pengalihan (keluar)	Rp
- Reklasifikasi keluar	Rp
- Koreksi Nilai	Rp
Jumlah (c)	Rp
Kenaikan/penurunan (b-c)	Rp
Saldo per 31 Desember 2023 (a+(b-c))	Rp 202.800,00

4.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban terdiri dari :

A. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 (Per 31 Desember 2022) dijelaskan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00
2	Utang Belanja	23.707.266,00	24.361.648,00
3	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
4	Kewajiban untuk dikonsolidasikan	0,00	0,00
Jumlah		23.707.266,00	24.361.648,00

B. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai Kewajiban Jangka Panjang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2023 adalah **NIHIL**.

4.4.3. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Nilai Ekuitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 31 Desember 2023 dan Tahun 2022 (Per 31 Desember 2022) dijelaskan dalam tabel berikut:

Uraian	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
Aset (a)	12.789.608.003	12.357.331.083
Kewajiban (b)	23.707.266	24.361.648
Ekuitas (c)	12.890.177.036	12.457.245.734

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Pengungkapan Penting Lainnya

Tidak ada

5.2 Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat

Telah ditindaklanjuti

5.3 Rekening Pemerintah

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai 12 (dua belas) Rekening GIRO pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sebagai berikut :

No.	NAMA REKENING	NOMOR REKENING
1.	DINAS P3A PPKB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1000102003741
2.	PPTK 1 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334401
3.	PPTK 2 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334402
4.	PPTK 3 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334403
5.	PPTK 4 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334404
6.	PPTK 5 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334405
7.	PPTK 6 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334406
8.	PPTK 7 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334407
9.	PPTK 8 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334408
10.	PPTK 9 DP3APPKB PROV KALTENG	1000102334409
11.	PPTK 10 DP3APPKB PROV KALTENG	10001023344010
12.	PPTK 11 DP3APPKB PROV KALTENG	10001023344011

Pada tanggal 31 Desember 2023 seluruh rekening tersebut bersaldo Rp 0,00 (Nol).

BAB VI P E N U T U P

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Basis Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan ini adalah basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, 15 Maret 2024

Kepala Dinas P3APPKB
Provinsi Kalimantan Tengah,



dr. Linae Victoria Aden, M.M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19680717 199903 2 006

L A M P I R A N

1. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.
2. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) per 31 Desember 2023.
3. Bukti Setoran Pengembalian Dana Uang Persediaan (UP) dan Pengembalian Belanja Lainnya Tahun 2023.
4. Berita Acara Pemeriksaan / Penutupan Kas atas Saldo Per 31 Desember 2023.
5. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan/Stock Opname atas Saldo Per 31 Desember 2023.
6. Rekening Koran Bendahara dan PPTK per 31 Desember 2023.
7. Surat Konfirmasi (Pernyataan) Bank atas Rekening Bendahara dan Rekening PPTK.
8. Rekapitulasi SP2D Tahun 2023.
9. Berita Acara Rekonsiliasi Keuangan Bulan Januari s/d Desember TA 2023.